

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP DALAM PERSPEKTIF SIYĀSAH SYAR'IIYAH**
(Studi di Desa Pulau Negara, Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kabupaten
Oku Timur, Sumatera Selatan)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu *Siyāсах*
Syar'iiyah

OLEH :

ANGGINI YULANDA AGUSTRIA

NPM : 1621020359

Prodi Hukum Tata Negara (*Siyāсах* *Syar'iiyah*)



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN AKADEMIK 1441 H/2020 M**

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP DALAM PERSPEKTIF SIYĀSAH SYA‘IYYAH**
(Studi di Desa Pulau Negara, Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kabupaten
Oku Timur, Sumatera Selatan)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu *Siyāṣah*
Syar‘iyyah

OLEH :

ANGGINI YULANDA AGUSTRIA

NPM : 1621020359

Prodi Hukum Tata Negara (*Siyāṣah Syar‘iyyah*)

Pembimbing I : Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A.

Pembimbing II : Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag.

**FAKULTAS SYARI‘AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN AKADEMIK 1441 H/2020 M**

ABSTRAK

Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menyebutkan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas lingkungan adalah adanya pencemaran dalam lingkungan. Yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai pada tingkat tertentu dan menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Allah SWT menciptakan manusia dengan tujuan yang jelas yaitu agar menjadi khalifah di bumi ini. Manusia diberi tanggung jawab agar memelihara, menjaga serta mengelola bumi ini beserta isinya. Artinya demi kelangsungan dan kepentingan kita sebagai manusia, Allah sebagai pemilik tunggal bumi dan seluruh alam semesta mengizinkan kita mendayagunakan bumi dan seluruh isinya secara maksimal. Namun demikian Allah SWT juga melarang manusia untuk membuat kerusakan di muka bumi ini. Kerusakan itu bermakna luas, bukan hanya kerusakan bumi secara fisik, namun juga kerusakan alam semesta beserta isinya (termasuk satwa di dalamnya). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Bagaimana menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat khususnya di daerah pedesaan? Dan bagaimana mendampingi masyarakat khususnya di pedesaan untuk membangun kesadaran berpola hidup sehat? Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. Untuk memperoleh data penulis melakukan observasi dan wawancara. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), penelitian data dan informasi bersumber dari lapangan.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)703260

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Anggini Yulanda Agustria

NPM : 1621020359

Program Studi : *Siyāsah Syar'iyah*

Fakultas : *Syari'ah*

Menyatakan bahwa Skripsi dengan judul: **Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif *Siyāsah Syar'iyah* (Studi di Desa Pulau Negara, Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kabupaten OKU Timur, Provinsi Sumatera Selatan)**. adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain, Kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 09 Maret 2020
Penulis,

Anggini Yulanda Agustria
NPM. 1621020359



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi Saudara:

Nama : Anggini Yulanda Agustria
NPM : 1621020359
Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : Implementasi Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009
Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Dalam Perspektif *Siyāsah Syar'iiyyah* (Studi di Desa Pulau
Negara, Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kabupaten Oku
Timur, Sumatera Selatan).

MENYETUJUI

Untuk di Munaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A.
NIP. 197403072000121000

Pembimbing II

Dr.H. Bunyana Sholihin, M.Ag.
NIP. 195707051989031001

Mengetahui

Ketua Jurusan Siyasah Syar'iiyyah

Frenki, M.Si.
NIP. 198003122009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"Implementasi Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif *Siyāsah Syar'iyah* (Studi Desa Pulau Negara, Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan)."** disusun oleh Anggini Yulanda Agustria, NPM : 1621020359, Program Studi *Siyāsah Syar'iyah*. Telah diujikan dalam sidang *Munaqasyah* di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Rabu, 11 Maret 2020.

Tim Penguji

Ketua	: Drs Susiadi AS, M.Sos.I.	(.....)
Sekretaris	: Erik R. Gumiri, M.H.	(.....)
Penguji Utama	: Dra. Firdaweri, M.H.I.	(.....)
Penguji Pendamping I	: Dr. Yusuf Baihaqi, Lc., MA.	(.....)
Penguji Pendamping II	: Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag.	(.....)



**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah**

**Dr. H. Khairuddin, M.H
NIP. 196210221993031002**

MOTTO

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ
قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ﴿٤٢﴾

Artinya : "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Katakanlah (Muhammad), Bepergianlah di bumi lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)."

(Q.S. Ar-Rūm [30]: 41-42).



PERSEMBAHAN

Puji syukur berkat rahmat dan hidayah dari Allah swt. Tanpa mengurangi rasa hormat, penulis mempersembahkan skripsi yang sederhana namun penuh perjuangan ini kepada :

1. Ayahanda Julizar, S.K.M. dan Ibunda Masrita, S.E. yang selalu melimpahkan do'a didalam ibadahmu dan selalu mendukung penuh, menasehati serta menyemangati penulis dalam menempuh pendidikan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakak Muhammad Rianzar, S.Hut., Ayuk Intan Permata Sari, S.H., dan Ayu Wulansari, S.E., adik Muhammad Rafa Al-Fajrizar, dan anak keponakan Muhammad Aldan Khairi Abizar, serta seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi.
3. Rofiqul Ummam, S.H. yang selalu menemani, menyemangati, memotivasi serta mendukung dalam menempuh hingga menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1).
4. Teman-teman mahasiswa atau mahasiswi angkatan 2016, terkhusus untuk kelas H Jurusan Siyāsah Syar'iyah yang telah bersama-sama menempuh pendidikan serta menimba ilmu.
5. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, sebagai tempat yang tidak dapat penulis lupakan dalam menimba ilmu pengetahuan serta pengamalannya.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Anggini Yulanda Agustria, dilahirkan di Blambangan Pagar pada tanggal 11 Agustus 1997, Anak ketiga dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak Julizar, S.K.M. dan Ibu Masrita, S.E. Pendidikan dimulai dari Taman Kanak-Kanak pada tahun 2002 dan selesai pada tahun 2003, melanjutkan ke SD Negeri Blambangan Pagar pada tahun 2003, pindah ke SD Negeri 1 Pulau Negara pada tahun 2004 dan selesai tahun 2010, melanjutkan ke MTs Negeri Martapura dan selesai tahun 2012, melanjutkan ke SMANegeri 2 Martapura dan selesai tahun 2015 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syari'ah dengan mengambil Prodi Hukum Tata Negara (Siyāsah syar'iyah) dimulai pada semester I Tahun Akademik 2016/2017.

Selama menjadi mahasiswa, aktif diberbagai kegiatan intra maupun ekstra di Fakultas syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 09 Maret 2020
Yang Membuat,

Anggini Yulanda Agustria

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur dipanjatkan atas kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya yang berupa ilmu pengetahuan, kesehatan serta petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Regulasi Transportasi Sepeda Motor Berbasis Aplikasi Online” dapat diselesaikan guna mendapatkan gelar sarjana Strata Satu (S1). Sholawat bermahkotakan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad saw, para sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang inshaallah mendapatkan syafa’at di hari akhir, aamiin.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan dan dorongan semua pihak. Oleh karena itu, tidak lupa dihaturkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini. Secara khusus disampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mohammad Mukri, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. KH. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku ketua Jurusan Siyāsah syar’iyyah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A. selaku dosen pembimbing I dan bapak Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag. selaku dosen pembimbing II.

5. Segenap civitas akademika, dosen serta karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
6. Bapak dan Ibu Kepala serta Staff karyawan perpustakaan Fakultas Syari'ah dan perpustakaan pusat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang telah memberikan informasi, data, referensi dan lain-lain.
7. Sahabat-sahabat seperjuangan jurusan siyāsah syar'iyah, khususnya kelas H yang telah memberi semangat, pelajaran serta do'a dalam mengerjakan hingga menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabatku sejak SD hingga SMA yang selalu memotivasi dalam mengerjakan skripsi.
9. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung;

Semoga Allah swt memberikan balasan keberkahan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadar akan kekurangan dalam skripsi yang jauh dari kata sempurna karena terbatasnya pengetahuan dan kemampuan dengan harapan skripsi ini dapat bermanfaat, tidak hanya untuk penulis tetapi juga untuk para pembaca, Aamiin.

Bandar Lampung, 09 Maret 2020

Anggini Yulanda Agustria
NPM. 1621020359

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘ —	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	— ’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
اَوَّ	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ ... اِ ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā	a dan garis di atas

يَ	<i>kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
وُ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*..

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjaīnā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمْ : *nu‘ima*

عُدُوْ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Afi (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال(*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur’ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-‘Ibārāt bi ‘umūm al-lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. *Lafz al-Jalālāh* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِإِلَهِ *dīnullāh* بِالله *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālāh*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُفِي رَحْمَةِالله *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal

dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Ṣyahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xx

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	4
C. Latar Belakang Masalah	5
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
F. Metode Penelitian	13

BAB II KAJIAN TEORI

A. Lingkungan Hidup	19
B. Ekologi Islam	28
C. <i>Siyāṣah Syar'iyah</i>	32
D. Tinjauan Pustaka	35

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK DAN DESKRIPSI DATA PENELITIAN

A. Lingkungan Hidup Dalam Hukum	39
B. Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU Timur di Desa Pulau Negara	42
C. Pengelolaan Lingkungan Hidup di Desa Pulau Negara	46
D. Perlindungan Lingkungan Hidup di Desa Pulau Negara	47

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Temuan Penelitian	49
B. Pembahasan	58
C. Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif <i>Siyāṣah Syar'iyah</i>	59

D. Penerapan Persepektif <i>Siyasah Syar'iyah</i> Terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	67
---	----

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan.....	77
B. Rekomendasi.....	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Dalam memberi gambaran yang jelas dan untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami proposal skripsi yang berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif *Siyāṣah Syar‘iyyah* (Studi Desa Pulau Negara, Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan), maka perlu diberinya penegasan dari istilah judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Implementasi

“Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan.”¹Dengan demikian implementasi dapat diartikan suatu penerapan atau tindakan yang dilakukan berdasarkan rencana yang telah disusun atau dibuat dengan cermat dan terperinci sebelumnya atau bisa dikatakan pengertian implementasi adalah suatu tindakan atau bentuk aksi nyata dalam melaksanakan rencana yang telah dirancang dengan matang. Dengan kata lain, implementasi hanya dapat dilakukan jika sudah ada perencanaan dan bukan hanya sekedar tindakan semata.

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.95.

Implementasi bermuara pada mekanisme suatu sistem. Penerapan implementasi harus sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat agar hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

“Undang-Undang adalah ketentuan dan peraturan Negara yang dibuat oleh Pemerintah, disahkan oleh Parlemen, ditandatangani oleh kepala Negara, dan mempunyai kekuatan yang mengikat.”² Dapat dikatakan bahwa Undang-Undang adalah hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur ketahanan yang lainnya. Sebelum disahkan, Undang-Undang disebut sebagai rancangan Undang-Undang. Undang-undang berfungsi untuk digunakan sebagai otoritas, untuk mengatur, untuk menganjurkan, untuk menyediakan dana, untuk menghukum, untuk memberikan, untuk mendeklarasikan, atau untuk membatasi sesuatu. Undang-Undang biasanya diusulkan oleh anggota badan legislatif, eksekutif dan selanjutnya dibahas di antara anggota legislatif. Undang-Undang sering kali diamendemen sebelum akhirnya disahkan atau mungkin juga ditolak. Undang-undang dipandang sebagai salah satu dari tiga fungsi utama pemerintahan yang berasal dari doktrin pemisahan kekuasaan. Kelompok yang memiliki kekuasaan formal untuk membuat legislasi disebut sebagai legislator.

²*Ibid.* h.138.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan mempunyai tiga fungsi demi memenuhi kebutuhan hidup manusia. Pertama, memberikan ruang untuk hidup, manusia dapat bertempat tinggal dan melakukan fungsi hidupnya. Kedua, lingkungan merupakan sumberdaya baik hayati maupun non hayati yang bersifat terbaharui. Ketiga, lingkungan juga memberikan pelayanan pada manusia agar tetap mendukung kehidupan manusia. Kualitas lingkungan hidup dapat mempengaruhi kesehatan manusia. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas lingkungan adalah adanya pencemaran dalam lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia.

3. Perspektif

“Perspektif adalah melukiskan sesuatu atau pandangan atas sesuatu hal.”³ Dengan kata lain perspektif adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena.

³*Ibid.* h.119.

4. *Siyāsah Syar‘iyyah*

Ulama Fiqh Dr. Abdul ‘Aal Ahmad ‘Athwah mengatakan bahwa *Siyāsah Syar‘iyyah* adalah pemimpin Islam dalam tugasnya mengatur kehidupan rakyat merealisasikan kemaslahatan-kemaslahatan umum bagi rakyat, dengan menerapkan hukum-hukum atau kebijakan-kebijakan yang disimpulkan berdasarkan dasar-dasar argumentasi yang diakui oleh syari‘at Islam, seperti *mashlahat mursalah*, *istihsān*, *saddu ad-dzarai‘*, *‘urf*, *istishlāh*, *ibhahashliyah*, dan lain sebagainya. Hal itu adalah dalam perkara-perkara yang tidak ada *nash*-nya dalam syariat Islam.

Definisi tersebut sesuai dengan realita. Sebab, perkara paling menonjol dalam *Siyāsah Syar‘iyyah* adalah pemimpin Islam di setiap tempat dan zaman berupaya semaksimal mungkin untuk merealisasikan kemaslahatan umum bagi umat Islam, dalam naungan syari‘at Islam, ketika mereka menghadapi peristiwa-peristiwa baru yang mereka tidak menemukan hukumnya berdasar dalil dari al-Qur‘an, As-Sunnah, *ijma‘*, ataupun *qiyas*.

B. Alasan Memilih Judul

Alasan penulis memilih judul “Implementasi Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif *Siyāsah Syar‘iyyah* (Studi Desa Pulau Negara, Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan), yaitu :

1. Karena di desa tersebut kurang memperhatikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu air sungai sekitarnya, hanya berfokus pada air sungai yang berada pada pekarangan rumah tidak memperhatikan bahwa pengguna air sungai bukan hanya untuk individu melainkan bagi masyarakat sekitar.
2. Penangkapan Ekosistem sungai seperti ikan-ikan dan udang di sekitar sungai, yang harusnya di tangkap dengan alat-alat seperti menjaring, menjala dan menajur, malah ditangkap dengan menggunakan alat setrum dengan sendirinya dapat menyebabkan kerusakan sungai, dan memunahnya ikan sungai di desa Pulau Negara.

Oleh karena itu, dengan adanya skripsi ini penulis ingin mempelajari bagaimana menjaga sumber daya air sungai agar tetap layak konsumsi bagi masyarakat sekitar bukan hanya bagi individu saja.

C. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan dan memiliki garis pantai yang terpanjang di dunia, mencapai 81.000 KM, yang secara garis besar dapat dibagi menjadi kawasan budidaya dan kawasan non budidaya. Sungai non budidaya dapat berupa daerah konservasi dan daerah yang tidak dibudidayakan, misalnya karena sumber daya alam yang miskin dan atau karena keadaan alamnya yang sulit dicapai.

Saat ini kondisi lingkungan di Desa Pulau Negara, Kecamatan Buay Pemuka Peliung cenderung mengalami penurunan kualitas sehingga lingkungan tersebut dapat berkurang fungsinya atau bahkan sudah tidak

mampu berfungsi lagi untuk menunjang pembangunan dan kesejahteraan penduduk secara berkelanjutan. "Penurunan kualitas lingkungan di banyak tempat terjadi terutama akibat pencemaran atau perusakan lingkungan di sekitarnya."⁴ Perusakan lingkungan disekitarnya dapat kita lihat dengan semakin meluasnya kawasan pemukiman penduduk, semakin meningkatnya produk industri rumah tangga yang akan memicu terjadinya peningkatan pencemaran pada perairan Sungai.

Penyebab permasalahan ini karena adanya semua limbah yang berasal dari pemukiman. Pedesaan maupun yang bersumber dari kawasan industri, pada akhirnya akan bermuara ke Sungai. "Limbah itu sendiri merupakan suatu buangan yang kotor, yang mengandung berbagai zat yang dapat membahayakan manusia itu sendiri atau bahkan hewan pada umumnya karena perbuatan manusia itu sendiri yang juga termasuk industrialisasi."⁵

Ada 3 sumber air limbah yang dapat mencemari lingkungan yang bermuara kesungai, yaitu :

1. Air limbah rumah tangga yakni sumber limbah yang berasal dari perumahan dan perdagangan serta tempat rekreasi.
2. Air limbah industri, dimana dapat berskala besar dan kecil yang puncak tertinggi aliran selalau tidak akan dilewati apabila menggunakan tangkis penahan dan bak pengaman.
3. Air limbah rembesan atau tambahan.

⁴Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), h.7.

⁵Agus Indiyanto dan Arqom Kuswanjono, *Konstruksi Masyarakat Tangguh Bencana* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2012), h.21

Air limbah sangatlah berbahaya bagi kesehatan manusia tentunya. Hal ini karena akan berdampak menimbulkan berbagai penyakit kepada manusia itu sendiri. "Warga yang tinggal dipinggir sungai apabila terkena air limbah tersebut akan berakibat timbulnya virus *typhus*, *disentri*, *tuberculosis*, cacing pita dan sebagainya yang akan adanya penyakit *kolera*, radang usus, *hepatitis* kedalam diri manusia tersebut."⁶

1. Masalah-masalah lingkungan sebagai pendorong

Dalam literatur masalah-masalah lingkungan dapat dikelompokkan kedalam tiga bentuk, yaitu pencemaran lingkungan (*pollution*), pemanfaatan lahan secara salah (*land misuse*) dan pengurasan habisnya sumber daya alam (*natural resource depletion*). Akan tetapi, jika dilihat dari perspektif hukum yang berlaku di Indonesia, "Masalah-masalah lingkungan dikelompokkan ke dalam dua bentuk, yakni pencemaran lingkungan (*environmental pollution*) dan perusakan lingkungan hidup."⁷

"Dampak negatif dari menurunnya kualitas lingkungan hidup baik karena terjadinya pencemaran atau terkurasnya sumber daya alam adalah timbulnya dampak negatif terhadap kesehatan, menurunnya nilai estetika, kerugian ekonomi, dan terganggunya sistem alami."⁸

⁶*Ibid.* h.61.

⁷Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, h.37

⁸Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Nasional* (Surabaya: Airlangga University Press, 1996), h.72

2. Faktor-Faktor penyebab terjadinya masalah-masalah lingkungan

Menurut penulis ada beberapa faktor penyebab terjadinya masalah-masalah lingkungan yakni Teknologi, Penduduk, Ekonomi, Politik dan Tata Nilai yang Berlaku.

Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menjelaskan Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diundangkan pada 3 Oktober 2009 dan dinyatakan berlaku sejak diundangkan. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini terlihat ada maksud untuk lebih memberi penekanan pada perlindungan lingkungan, meskipun sebenarnya kata pengelolaan lingkungan sudah terkandung makna pemanfaatan dan sekaligus perlindungan lingkungan. Penamaan ini didasarkan pada pandangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan rasionalisasi agar lebih memberikan makna tentang pentingnya lingkungan hidup untuk memperoleh perlindungan.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 pada pasal 1 angka 1 sampai dengan angka 30 sudah diatur dengan jelas. Untuk itu perlu dilakukan upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, "Perlindungan

dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.”⁹ Pengertian ini memiliki lingkup pengaturan yang lebih luas. Lingkup pengaturannya tidak hanya menekankan pada aspek pengendalian lingkungan hidup, tetapi menurut “...Pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, meliputi aspek perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.”¹⁰

Lingkungan pengaturan demikian selaras dengan pengertian lingkungan hidup dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu “Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.”¹¹ Dari pengertian ini sangat jelas bahwa pengertian lingkungan hidup meliputi kesatuan ruang yang meliputi semua

⁹Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 angka 2.

¹⁰Danusaputro Munajat, *Hukum Lingkungan Buku I* (Bandung: Bina Cipta, 1981), h.52.

¹¹*Ibid.* h.54.

Sumber Daya Alam baik hayati maupun non hayati, sumber daya buatan, dan sumber daya manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain.

Beberapa ayat dalam al-Qur`an yang menganjurkan menjaga kelestarian lingkungan hidup:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ﴿٤٢﴾

Artinya : "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (41) Katakanlah (Muhammad), Bepergianlah di bumi lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)." (42). (Q.S. Ar-Rūm [30]: 41-42).

Kandungan Ayat tersebut merupakan suruhan Allah Swt kepada manusia agar melestarikan alam dan lingkungannya karena sudah diatur oleh yang mahakuasa. Penegasan Allah Swt bahwa berbagai kerusakan yang terjadi di darat dan di laut adalah akibat ulah atau perbuatan manusia, oleh karena itu hendaklah manusia menghentikannya mau kembali ke jalan yang benar yaitu dengan menggantikannya dengan perbuatan yang baik. Allah Swt menyuruh agar manusia mempelajari umat-umat terdahulu atau sejarah, banyaklah bencana yang menimpa kepada umat-umat terdahulu disebabkan mereka tidak menghiraukan seruan Allah, bahkan kebanyakan mereka ingkar dan musyrik kepada-Nya. Penjelasan ayat al-Qur`an Surat Ar-Rūm adalah surat yang ke 30 terdiri atas 60 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah. Dinamakan Ar-Rūm karena pada permulaan surat ini yaitu ayat 2,

3, dan 4 terdapat pemberitaan bangsa Romawi yang pada mulanya dikalahkan oleh bangsa Persia, tetapi setelah beberapa tahun kemudian kerajaan Rūm dapat menuntut balas dan mengalahkan kerajaan Persia kembali. Pada ayat ini menerangkan bahwa Allah Swt menciptakan alam semesta dan segala isinya adalah untuk dimanfaatkan oleh manusia demi kesejahteraan hidup dan kemakmurannya. Manusia diangkat sebagai khalifah di bumi yang diamanati agar menjaga kelestarian alam jangan sampai rusak. Manusia diperbolehkan menggali kekayaan alam, mengolahnya, dan memanfaatkan sebagai bekal beribadah kepada Allah dan beramal soleh. Namun kenyataannya karena manusia mempunyai sifat tamak, rakus, atau yang berlebihan sehingga penggalian alam itu tak terkendalikan yang berdampak menjadi bencana alam, seperti tanah longsor, banjir, alam menjadi tandus, kekeringan, alam menjadi gersang, dan udara tercemar dan lain sebagainya. Kerusakan alam itu akan berakibat pula kesengsaraan pada diri manusia itu sendiri. Oleh karena itu manusia disuruh mempelajari sejarah sebelumnya bahwa banyak manusia yang menjadi sengsara akibat mereka tidak mau lagi menghiraukan seruan Allah swt, bahkan mereka kebanyakan berbuat musyrik dan kufur kepada Tuhannya.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat khususnya di daerah pedesaan dalam perspektif *Siyāṣah Syar'iyah*?
2. Bagaimana mendampingi masyarakat khususnya di pedesaan untuk membangun kesadaran berpola hidup sehat berdasarkan Undang-Undang

Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup dengan perspektif *Siyāsah Syar‘iyyah*?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat khususnya di daerah pedesaan dalam perspektif *Siyāsah Syar‘iyyah*.
- b. bagaimana mendampingi masyarakat khususnya di pedesaan untuk membangun kesadaran berpola hidup sehat berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup dengan perspektif *Siyāsah Syar‘iyyah*.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis ialah sebagai pengetahuan tambahan untuk penulis maupun pembaca, khususnya terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis ialah sebagai salah satu syarat untuk terpenuhinya dalam menyelesaikan study di Jurusan *Siyāsah Syar‘iyyah* Fakultas Syari‘ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

“Dalam mencapai tujuan penelitian dengan tetap mengacu kepada standar ilmiah sebuah karya penelitian, untuk itu penulis menggunakan metode yang ada sebagai acuan dalam suatu penelitian.”¹² Adapun metode-metode diantaranya, sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang dengan kata lain adalah “jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut dengan penelitian lapangan (*field Research*), yakni mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyatannya dalam masyarakat.”¹³ “Penelitian ini dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya terjadi dalam masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan untuk melengkapi penelitian ini.”¹⁴

b. Sifat Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sifat penelitian yuridis sosiologis. “Sifat yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi social yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang

¹²Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h.15.

¹³Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), h.15.

¹⁴Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), h.36.

nyata.”¹⁵“Ilmu sosial diperlukan perannya dalam penelitian ini karena ilmu sosial memiliki karakteristik yang deskriptif dan kategoris.”¹⁶

Sifat Perundang-undangan dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah terhadap norma-norma yang terdapat al-Qur`an dan Hadits dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

“Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.”¹⁷ Sumber data yang diperoleh secara langsung dengan wawancara kepada :

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan.
2. Kepala Desa Pulau Negara Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan.

b. Data Sekunder

“Data sekunder merupakan data yang diperoleh sebagai pelengkap dari data primer. Sumber data sekunder dari penelitian ini

¹⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), h.51.

¹⁶Kuntjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat, -cet II* (Jakarta: PT Gramedia, 1985), h.83.

¹⁷Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h.30.

adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.”¹⁸

3. Metode pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Seiring perkembangan teknologi, metode wawancara dapat pula dilakukan melalui media-media tertentu, misalnya telepon, email, atau skype. Wawancara terbagi atas dua kategori, yakni wawancara terstruktur dan tidak terstruktur.

Dalam wawancara terstruktur, peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang hendak digali dari narasumber. Pada kondisi ini, peneliti biasanya sudah membuat daftar pertanyaan secara sistematis. Peneliti juga bisa menggunakan berbagai instrumen penelitian seperti alat bantu recorder, kamera untuk foto, serta instrumen-instrumen lain.

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas. Peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan spesifik, namun hanya memuat poin-poin penting dari masalah yang ingin digali dari responden.

b. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Metode

¹⁸Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT Hanindita Offset, 1983), h.86.

pengumpulan data observasi tidak hanya mengukur sikap dari responden, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi. Teknik pengumpulan data observasi cocok digunakan untuk penelitian yang bertujuan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam. Metode ini juga tepat dilakukan pada responden yang kuantitasnya tidak terlalu besar. Metode pengumpulan data observasi terbagi menjadi dua kategori, yakni:

1) *Participant observation*

Dalam *participant observation*, peneliti terlibat secara langsung dalam kegiatan sehari-hari orang atau situasi yang diamati sebagai sumber data.

2) *Non participant observation*

Berlawanan dengan *participant observation*, *non participant observation* merupakan observasi yang peneliti tidak ikut secara langsung dalam kegiatan atau proses yang sedang diamati.

4. Pengolahan data

a. Penyuntingan (*editing*)

Kegiatan yang dilakukan adalah memeriksa seluruh daftar pertanyaan yang dikembalikan responden. Beberapa hal yang perlu diperhatikan:

- 1) Kesesuaian jawaban responden dengan pertanyaan yang diajukan.
- 2) Kelengkapan pengisian daftar pertanyaan.
- 3) Ketetapan (*consistency*) jawaban responden.

Dalam menyunting, penyunting harus diberitahu agar tidak mengganti atau menafsirkan jawaban responden. Jadi kebenaran jawaban dapat terjaga.

b. Pengkodean (*coding*)

- 1) Pengkodean dapat dilakukan dengan memberi tanda atau simbol yang berupa angka pada jawaban responden yang diterima.
- 2) Tujuan pengkodean adalah untuk penyederhanaan jawaban responden.
- 3) Harus diperhatikan pemberian pada jenis pertanyaan yang diajukan atau pertanyaan terbuka atau pertanyaan tertutup.
- 4) Untuk pertanyaan tertutup, kode ditentukan dengan mudah, misalnya 1 untuk jawaban ya atau setuju dan kode 0 untuk tidak atau tidak setuju atau ditambah kode 99 untuk jawaban yang kosong atau responden tidak memberi jawaban.
- 5) Untuk pertanyaan terbuka dilakukan dengan tahapan tertentu, sebagai berikut :
 - a) Jawaban responden diperiksa untuk dibuat kategori jawaban tertentu.
 - b) Apabila ternyata jawaban perlu dikategorikan, dibuat kategori yang sesuai.
 - c) Setelah itu tiap kategori diberi kode.

Seluruh kode yang ditentukan untuk tiap jawaban, disusun dalam buku kode. Buku kode ini selain diperlukan dalam pengkodean juga digunakan sebagai pedoman untuk analisis data dan penulisan laporan.

5. Analisis Masalah

Analisis masalah adalah kajian sementara untuk mengetahui penyebab timbulnya masalah,serta alternatif pemecahan masalah tersebut. Berdasarkan hasil identifikasi masalah,sesuai dengan pengertian analisis masalah yang dapat di simpulkan adalah merosotnya kualitas hasil ekosistem sungai dan fungsi air sungai karena rendahnya kesadaran dari masyarakat akan bahaya dari air sungai yang telah tercemar oleh limbah dan kerusakan ekosistem sungai akibat penangkapan hewan-hewan sungai dengan illegal yang dapat menyebabkan dampak buruk bagi kelangsungan hidup masyarakat yang masih memanfaatkan air sungai untuk kelangsungan hidup dan bukan hanya masyarakat sekitar yang merasakan dampak buruknya, melainkan bagi hewan-hewan sungai yang ada di dalamnya. Sehingga dibutuhkan hukum yang kuat dan kesadaran dari diri masyarakat sekitar untuk menjaga kelestarian air sungai agar anak dan cucu kita dapat merasakan keindahan air sungai sebagai warisan nenek moyang.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Lingkungan Hidup

1. Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

“...Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan konstitusi yang menjadi hukum dasar atau pegangan dalam penyelenggaraan Negara Indonesia.”¹⁹“Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara formal disahkan sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia.”²⁰

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam membuat Peraturan Perundang-undangan merujuk pada Pasal 20 dan Pasal 21, sedangkan dalam mengatur mengenai lingkungan hidup maka dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merujuk kepada Pasal 28H ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”²¹Selain itu lingkungan hidup juga berlandaskan pada Pasal 33 ayat (3) dan (4), yang berbunyi :

¹⁹A. Ubaedillah, *Pancasila, Demokrasi, dan Pencegahan Korupsi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h.46 .

²⁰Khairuddin, M. Iwan Satriawan, *Hukum Tata Negara* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), h.33.

²¹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1).

- “(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi Nasional.”²²

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup

a. Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mulai tidak berlaku ketika keluarnya Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup pada tanggal 3 Oktober tahun 2009. Pembaharuan Peraturan tersebut terjadi dengan maksud untuk lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem.

Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup memiliki beberapa perbedaan mendasar terhadap Peraturan sebelumnya yaitu terdapat penguatan tentang prinsip dalam perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu prinsip tersebut merupakan tentang hal penegakan hukum lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang

²²Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3) dan (4).

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Terdapat empat proses dalam penegakkan hukum lingkungan sebagai berikut :

1) Penyadaran

Proses penyadaran hukum dilakukan sebagai upaya kesadaran dalam menaati hukum dalam menjaga lingkungan

2) Penataan

Proses penataan hukum dilakukan sebagai upaya agar masyarakat dapat mengetahui memahami serta mematuhi peraturan terhadap lingkungan.

3) Penindakan

Proses penindakan hukum dilakukan sebagai upaya memberikan sanksi bagi pelaku pelanggaran Peraturan tentang lingkungan. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi pidana, perdata serta administrasi.

4) Penyelesaian sengketa

Penyelesaian sengketa merupakan upaya terakhir dalam menyelesaikan permasalahan hukum dalam lingkungan.

b. Tujuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perkembangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, perlu di imbangi dengan berkembangnya payung hukum agar terciptanya sistem hukum yang tegas agar terdapat kepastian hukum untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ialah :

- “a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi mendatang;
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global.”²³

c. Ruang Lingkup Lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup

Ruang lingkup lingkungan pada dasarnya ditentukan terhadap pengelola lingkungan tersebut, yang dalam hal ini ialah Pemerintah.

²³Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 3.

“Pengelolaan lingkungan merupakan terutama dilakukan oleh Pemerintah, maka hukum lingkungan sebagian besar terdiri atas hukum Pemerintahan (*bestuursrecht*). Disamping hukum lingkungan Pemerintahan (*bestuursrechtelijk milieurecht*) terdapat pula hukum lingkungan keperdataan (*privaat rechtelijk milieurecht*), hukum lingkungan ketatanegaraan (*staatrechtelijk milieurecht*), hukum lingkungan kepidanaan (*strafrechtelijk milieurecht*), sepanjang bidang-bidang hukum ini memuat ketentuan-ketentuan yang bertalian dengan pengelolaan lingkungan hidup.”²⁴

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup juga memberikan kewenangan yang luas kepada Menteri dalam bidang tersebut untuk melaksanakan seluruh kewenangan Pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta melakukan koordinasi dengan instansi lain. Selain itu Pemerintah Daerah juga mempunyai kewenangan dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Daerah. Lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan tersebut memiliki wewenang dalam mengawasi sumber daya alam untuk kepentingan konservasi serta tugas-tugas lain yang telah diatur dalam Peraturan tersebut dengan dukungan pendanaan yang berbeda pula dari masing-masing lembaga seperti Menteri yang mendapatkan dana dari anggaran pendapatan dan belanja Negara, serta Pemerintah Daerah dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

“Pemerintah Daerah yang dalam hal ini adalah kabupaten atau kota memiliki beberapa kewenangan dalam pengelolaan lingkungan hidup sebagai berikut :

²⁴Hardjasoemantri Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*(Yogyakarta: Gadjah Mada Universiti Press, 2012), h.12.

- a. Menetapkan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten berdasarkan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup nasional dan provinsi dengan mempertimbangkan kajian lingkungan hidup strategis.
- b. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pengelolaan lingkungan hidup yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- c. Melakukan pengelolaan lingkungan hidup di Wilayah Kabupaten atau Kota.
- d. Mengembangkan kemitraan dengan masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- e. Memfasilitasi penyelesaian sengketa dibidang pengelolaan lingkungan hidup.
- f. Mengembangkan instrumen ekonomi pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten atau Kota.
- g. Melakukan pembinaan kepada masyarakat dan badan usaha yang bergerak dibidang pengelolaan lingkungan hidup.
- h. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan dibidang pengelolaan lingkungan hidup.
- i. Melaksanakan standar pelayanan minimal dibidang pengelolaan lingkungan hidup yang ditetapkan Pemerintah dan melaksanakan kerjasama antar daerah dibidang pengelolaan lingkungan hidup.”²⁵

3. Asas-Asas Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

“...Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaannya harus beracuan kepada asas-asas yang menjadi dasar, yang telah dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”,²⁶ sebagai berikut :

- a. Asas tanggung jawab negara;

“Asas tanggungjawab negara memiliki pengertian bahwa negara :

²⁵Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.83.

²⁶Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 2.

- 1) Menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat baik di masa kini maupun di masa yang akan datang.
- 2) Menjamin hak warga negara akan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- 3) Mencegah kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.”²⁷

b. Asas kelestarian dan keberlanjutan;

“Asas kelestarian dan keberlanjutan berarti bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggungjawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam suatu generasi yang sekarang dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.”²⁸

c. Asas keserasian dan keseimbangan;

“Asas keserasian dan keseimbangan memiliki arti bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.”²⁹

d. Asas keterpaduan;

“Asas keterpaduan berarti bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan

²⁷PenjelasanUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 2 Huruf a.

²⁸PenjelasanUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 2 Huruf b.

²⁹PenjelasanUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 2 Huruf c..

berbagai unsur atau dengan menyinergikan berbagai komponen terkait.”³⁰

e. Asas manfaat;

“Asas manfaat berarti bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungan.”³¹

f. Asas kehati-hatian;

“Asas kehati-hatian memiliki arti bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.”³²

g. Asas keadilan;

“Asas keadilan berarti bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.”³³

h. Asas ekoregion;

“Asas ekoregion memiliki arti bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik

³⁰PenjelasanUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 2 Huruf d.

³¹PenjelasanUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 2 Huruf e.

³²PenjelasanUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 2 Huruf f.

³³PenjelasanUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 2 Huruf g.

sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.”³⁴

i. Asas keanekaragaman hayati;

“Asas keanekaragaman hayati berarti bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.”³⁵

j. Asas pencemar membayar;

“Asas pencemar membayar memiliki arti bahwa setiap penanggungjawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.”³⁶

k. Asas partisipatif;

“Asas partisipatif memiliki arti bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.”³⁷

³⁴PenjelasanUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 2 Huruf h.

³⁵PenjelasanUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 2 Huruf i.

³⁶PenjelasanUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 2 Huruf j.

³⁷PenjelasanUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 2 Huruf k.

l. Asas kearifan lokal;

“Asas kearifan lokal memiliki arti bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.”³⁸

m. Asas tata kelola pemerintahan yang baik;

“Asas tata kelola pemerintahan yang baik memiliki arti bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.”³⁹

n. Otonomi daerah.

“Asas otonomi daerah dimaksudkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.”⁴⁰

B. Ekologi Islam

Ekologi merupakan ilmu yang kaitannya erat dengan ilmu lingkungan, dalam pengertiannya

“Ekologi merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang bersifat interdisipliner, yang berarti bahwa untuk mengerti hubungan antara organisme atau hewan, manusia dan

³⁸PenjelasanUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 2 Huruf l.

³⁹PenjelasanUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 2 Huruf m.

⁴⁰PenjelasanUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 2 Huruf n.

tumbuhan, dengan lingkungannya tentu haruslah ditarik beberapa pengertian dari banyak bidang yang berkaitan.”⁴¹

“Secara umum ekologi didefinisikan sebagai pengkajian hubungan organisme-organisme atau kelompok organisme terhadap lingkungannya, atau ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara organisme hidup dan lingkungannya.”⁴²Dari pengertian-pengertian dari ekologi tersebut, maka dalam membahas ilmu lingkungan, ekologi juga harus dikaitkan dalam pembahasan karena ilmu tersebut saling berkaitan satu sama lain. Ada pendapat yang mengatakan bahwa

“Ilmu lingkungan dapat dikatakan sebagai ekologi terapan atau *applied ecology*, yakni bagaimana menerapkan berbagai prinsip dan ketentuan ekologi itu dalam kehidupan manusia, atau ilmu yang mempelajari bagaimana manusia harus menempatkan dirinya dalam suatu ekosistem atau dalam lingkungan hidupnya.”⁴³

Ekologi memandang lingkungan sebagai sumber daya sebagai kebutuhan makhluk hidup.

“...Salah satu makhluk hidup ialah manusia, dimana kebutuhan manusia terhadap lingkungan ini dapat dibedakan menjadi tiga kebutuhan, yakni :

1. Kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup hayati, manusia membutuhkan air, udara, dan pangan dalam kuantitas dan mutu tertentu, serta terlindung dari serangan organisme berbahaya.
2. Kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup, manusia tidak cukup dengan kelangsungan hidup secara hayati, namun juga harus manusiawi. Contoh manusiawi dalam hal ini yakni, pangan yang tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan tubuh, melainkan juga harus disajikan dengan rasa, bentuk.

⁴¹M.Fadli, Mukhlis, Mustafa Lutfi, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2016), h.8.

⁴²Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), h.2.

⁴³M.Fadli, Mukhlis, Mustafa Lutfi, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan....*, h.10.

Karena bisa jadi manusia mampu bertahan hidup dengan memakan daging hewan mentah, namun hal tersebut tidak manusiawi sehingga harus dimasak atau diolah terlebih dahulu.

3. Kebutuhan dasar untuk memilih kemampuan, memilih merupakan sifat hakiki pada semua makhluk, di mana pilihan itu dapat sangat luas atau sangat khusus.”⁴⁴

Ekologi merupakan ilmu yang sangat erat hubungannya antara organisme dengan lingkungan, terlebih tentang komponen-komponen dari makhluk hidup dan lingkungan, maka ekologi juga berkaitan dengan ilmu kimia, fisika, pertanian, kehutanan dan ilmu-ilmu lainnya, bahkan ekologi dapat berkaitan dengan hampir semua bidang ilmu yang ada. Pentingnya lingkungan hidup untuk dikelola dan dijaga.

Selanjutnya Islam juga mengenal tentang ekologi, dimana Islam mempunyai kata lain, seperti

“Dalam bahasa Arab, ekologi dikenal dengan istilah *‘ilm al-bī’ah*. Secara etimologi, kata *bī’ah* diambil dari kata kerja *bawa’a* yang terdiri dari huruf *bā-wau-hamzah* yang memiliki arti tinggal, berhenti, dan menetap. Bentuk *isim* dari kata *bawa’a* ini adalah *al-bī’ah* yang berarti rumah atau tempat tinggal.”⁴⁵

Islam juga sangat memperhatikan keseimbangan dalam lingkungan hidup, karena Islam memandang dalam mengelola serta melindungi lingkungan hidup merupakan *sunnatullah*. *Sunnatullah* sendiri dalam pengertiannya merupakan “Peraturan Allah yang diberlakukan pada alam semesta, pada

⁴⁴Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia, Sebuah Pengantar* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.5-6.

⁴⁵Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003), h. 183.

saat dan sesaat setelah diciptakan, untuk diikutinya.”⁴⁶ Untuk itu manusia harus memerankan fungsinya untuk mengelola dan melindungi lingkungan. Sebagaimana dalam al-Qur`an, manusia juga sebagai khilafah yang harus memiliki tanggung jawab kepada lingkungan untuk berlangsungnya ekosistem kehidupan.

Ekologi Islam juga mengajarkan bahwa Allah Swt sebagai pencipta alam, juga sebagai pemelihara manusia, makhluk hidup dan alam semesta. “...Islam mengajarkan bagaimana ekologi dalam Islam didefinisikan sebagai konsep keyakinan agama yang kaitannya dengan persoalan lingkungan yang didasarkan pada ajaran agama Islam yang bersumber dari hukum-hukum Islam.”⁴⁷

Lingkungan hidup merupakan keberlanjutan hajat hidup manusia di bumi, untuk itu perlunya aturan untuk mengelola serta melindungi lingkungan hidup dalam perubahan iklim global dan perkembangan zaman, namun tidak terlepas dari ajaran serta sumber hukum Islam agar lingkungan hidup dapat bermanfaat untuk kedepannya. Untuk itu penulis mengambil pandangan ekologi Islam sebagai kajian teori dengan maksud dapat mengaplikasikan temuan masalah yang ada dengan pandangan ekologi terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di desa Pulau Negara, Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

⁴⁶Acmad Baiquni, *al-Qur`an dan Ilmu Pengetahuan Teknologi* (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1995) h. 24.

⁴⁷Parid Ridwanuddin, *Ekoteologi Dalam Pemikiran Badiuzzaman Said Nursi, Lentera, Vol. I*. 9 Januari 2020, h. 47.

C. *Siyāsah Syar‘iyyah*

1. Pengertian *Siyāsah Syar‘iyyah*

“Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *Siyāsah* adalah Pengaturan Perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.”⁴⁸

“...Jika dipandang dalam kemaslahatan maka terdapat syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut :

- a. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan *maqashid al-syari'ah*, semangat ajaran, dalil-dalil *kulli* dan dalil *qoth'I* baik *wurud* maupun *dalalahnya*.
- b. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat serta menghindarkan *mudharat*.
- c. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.”⁴⁹

Maka dapat disimpulkan bahwa *Siyāsah Syar‘iyyah* pengertiannya merupakan disiplin ilmu yang berhubungan dengan politik hukum dalam Negara baik dalam bentuk Peraturan atau kebijakan Pemerintah yang sesuai dengan *syari'at*.

Siyāsah Syar‘iyyah dalam pandangannya mengisyaratkan bahwa kebijakan yang pernah diambil oleh pemerintahan sebelumnya dapat diteruskan untuk pemerintahan saat ini ataupun mendatang, dengan syarat tidak bertentangan dengan *syari'ah* secara keseluruhan, serta sebagai upaya dalam menegakkan *syari'ah* di zaman sekarang.

⁴⁸H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2011), h.1.

⁴⁹*Ibid*, h.28-29.

2. Sumber Hukum *Siyāsah Syar‘iyyah*

Siyāsah Syar‘iyyah memiliki sumber-sumber hukum sebagai acuan dari kajian tersebut

“Sumber-sumber pokok *Siyāsah Syar‘iyyah* adalah al-Qur`an dan sunnah dalam menciptakan Peraturan-Peraturan Perundang-undangan dan mengatur kehidupan bernegara. Jika tidak dapat ditemukan dalilnya dapat menggunakan pendapat para ahli, yurisprudensi, adat istiadat masyarakat yang bersangkutan, pengalaman dan warisan budaya.”⁵⁰

Selain itu, dengan berpegang kepada sumber-sumber pada kajian *Siyāsah Syar‘iyyah* ini yang dimana mengajarkan kepada seluruh umat manusia agar mendapatkan kemaslahatan di dunia maupun akhirat. Terdapat 4 sumber utama dalam kajian *Siyāsah Syar‘iyyah*, sebagai berikut :

a. al-Qur`an

al-Qur`an merupakan pedoman hidup manusia, al-Qur`an juga menjadi penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, yang dimana telah menjadi sumber hukum utama dalam menentukan segala sesuatu.”al-Qur`an menurut bahasa berarati bacaan, dan menurut istilah *ushul fiqh* berarti kalam atau perkataan allah yang diturunkan-Nya dengan perantaraan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Saw dengan bahasa arab serta dianggap beribadah membacanya.”⁵¹

“al-Qur’an adalah sumber atau dasar hukum yang utama dari semua ajaran dan *syari’at* Islam. Secara istilah yang dimaksudkan dengan sebutan al-Qur’an itu adalah firman

⁵⁰ Ahmad Sukardja, *Piagam Madina Dan UUD 1945* (Jakarta: UI Press, 1995), h. 11.

⁵¹ Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2017), h.75.

Allah Swt berupa wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad Saw.”⁵²

“Terdapat berbagai prinsip dan ajaran dasar Islam yang meliputi akidah, syari’ah dan akhlak dalam al-Qur`an.”⁵³ Atas dasar pengertian al-Qur`an tersebut maka dalam menetapkan hukum para mujtahid mengacu kepada al-Qur`an sebagai sumber pertama dan utama.

b. Hadits

Hadits merupakan sumber kedua setelah al-Qur`an sebagai sumber hukum *Siyāsah Syar‘iyyah*.

“Hadits merupakan ucapan *Rasulullah* Saw tentang suatu yang berkaitan dengan kehidupan manusia atau tentang suatu hal, atau dapat disebut dengan sunnah *qauliyyah*. Hadist merupakan bagian dari sunnah Rasulullah. Secara istilah *syara’* yang dimaksudkan dengan sunnah itu adalah apa saja yang muncul dari *Rasulullah* Muhammad Saw baik berupa perkataan atau perbuatan maupun ketetapan.”⁵⁴

c. *Ijma’*

Ijma’ merupakan sumber ketiga setelah al-Qur`an dan Hadits dalam pembahasan *siyasah dusturiyah*. Dalam penjelasannya *Ijma’*

“Secara bahasa mengandung dua pengertian sebagai berikut :

- 1) Yaitu niat dan kehendak untuk sesuatu.
- 2) Kesepakatan terhadap suatu hal.”⁵⁵

⁵²Bunyana Sholihin, *Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib dan Fungsi Legislasi Hukum dan Perundang-undangan* (Bandar Lampung: Kreasi Total Media, 2015), h.14.

⁵³Firdaus, *Ushul Fiqh, Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Ciputat: PT Bestari Buana Group, 2004), h.36.

⁵⁴Bunyana Sholihin, *Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib dan Fungsi Legislasi Hukum dan Perundang-undangan*, h.14.

⁵⁵*Ibid.* h.15.

D. Tinjauan Pustaka

Terkait meninjau penelitian tentang Implementasi Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif *Siyāṣah Syar'iyah* (Studi Desa Pulau Negara, Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan), maka terdapat penelitian yang telah dilakukan sebagai tinjauan pustaka, sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Irvan Maulana, yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Kondisi Lingkungan Masyarakat Akibat Pencemaran di Wilayah Halim Perdanakusuma Jakarta Timur.” Penelitian tersebut menjelaskan tentang

“...Perlindungan terhadap kondisi lingkungan masyarakat akibat pencemaran di wilayah halim perdanakusuma Jakarta timur, yang pencemarannya dalam hal ini ialah sampah serta limbah-limbah pabrik dari lingkungan sekitar yang langsung dibuang ke aliran sungai, yang dimana ini tidak sesuai yang dimana masyarakat harusnya mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat dalam masyarakat yang memiliki hak untuk lingkungan yang nyaman untuk dirinya. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan yang bersih dan sehat. Berhaknya masyarakat Wilayah Halim Perdanakusuma Jakarta Timur dalam memiliki perlindungan Hukum Lingkungan akibat Pencemaran yang terjadi di Wilayah tersebut.”⁵⁶

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan ialah, penelitian tersebut lebih meneliti perlindungan hak untuk mendapatkan lingkungan yang layak dan tindak lanjut suku Dinas

⁵⁶Muhamad Irvan Maulana, “Perlindungan Hukum Terhadap Kondisi Lingkungan Masyarakat Akibat Pencemaran di Wilayah Halim Perdanakusuma Jakarta Timur” (Skripsi Program Studi Hukum Administrasi Negara, Universitas Lampung, Lampung, 2018).

Lingkungan Hidup. Sedangkan Penelitian yang penulis lakukan lebih menitikberatkan kepada peran Dinas Lingkungan Hidup dalam mengelola dan melindungi yang dimana penulis lebih mengacu kepada Implementasi Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kemudian penulis juga memandang permasalahan tersebut dalam kajian siyasah syar'iyah yang bersumber dari hukum-hukum Islam.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Eva Anggraeni Diah, yang berjudul “Hakikat Manusia dan Lingkungan Dalam Prespektif Ekologi Islam”.

Penelitian tersebut menjelaskan tentang

“...Manusia yang diciptakan oleh Allah, dan diamanahkan padanya tanggungjawab yang besar sebagai khalifah untuk mensejahterakan semua kehidupan di bumi termasuk dengan lingkungan hidup. Kurangnya kesadaran manusia bahwa hubungan antara manusia dan lingkungan adalah hubungan yang telah ditetapkan dan diatur oleh Tuhan. hakikat Islam ialah saling berkaitan dimana Allah sebagai pencipta dan pemelihara manusia dan alam untuk saling bersinergi dalam menjaga sistem ekologi.”⁵⁷

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan ialah, penelitian tersebut lebih menjelaskan pandangan ekologi Islam kepada manusia dan alam serta menjelaskan kepada hakikat manusia dan alam itu sendiri terhadap pencipta, sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih menitikberatkan kepada peran Dinas Lingkungan Hidup

⁵⁷Eva Anggraeni Diah, “Hakikat Manusia dan Lingkungan Dalam Prespektif Ekologi Islam” (Skripsi Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam , Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2018)

dalam mengelola dan melindungi yang dimana penulis lebih mengacu kepada Implementasi Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kemudian penulis juga memandang permasalahan tersebut dalam kajian *siyasah syar'iyah* yang bersumber dari hukum-hukum Islam.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Zulharman, dengan judul “Penegakan Hukum Lingkungan Administrasi Dalam Upaya Perlindungan Kawasan Karst Di Kabupaten Maros.” Penelitian tersebut menjelaskan tentang

“...Bagaimana penegakan hukum lingkungan administratif dalam upaya perlindungan kawasan karst di Kabupaten Maros, serta untuk Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum lingkungan administratif dalam upaya perlindungan kawasan karst di Kabupaten Maros.”⁵⁸

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan ialah, penelitian tersebut lebih mendeskripsikan bagaimana hukum administrative dalam lingkungan di kabupaten maros serta menjelaskan factor-faktor yang mempengaruhinya, sedangkan hasil penelitian yang penulis lakukan yakni peran Dinas Lingkungan Hidup dalam mengelola dan melindungi yang dimana penulis lebih mengacu kepada Implementasi Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kemudian penulis juga memandang permasalahan tersebut dalam kajian *siyasah syar'iyah* yang bersumber dari hukum-hukum Islam.

⁵⁸Zulharman, “Penegakan Hukum Lingkungan Administrasi Dalam Upaya Perlindungan Kawasan Karst Di Kabupaten Maros” (Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017).